ALASAN PEMAAF TERHADAP PERBUATAN PENIPUAN PADA KONTRAK KERJASAMA PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA DAN PT HELLICARG INDONESIA

Ivan Ghani Lubis¹, Mahmud Mulyadi², Wessy Trisna³

Universitas Sumatera Utara, Medan

email: ¹ivan.ghani.lubis.sh.@gmail.com, ²mahmud_mulyadi@usu.ac.id,

³wessy_trisna@yahoo.com

Abstract: *In certain situations, if an act is proven not to constitute a criminal act, this means that the act charged and proven is not regulated and does not fall within the scope of criminal law. The formulation of the problem in this thesis research is what is the point of contact between the crime of fraud and the crime of embezzlement and acts against civil law in the legal system in Indonesia, what is the basis for judges' considerations in deciding criminal cases using forgiving reasons due to the influence of coercive power, how is the application of reasons for expunging crimes in the judge's decision in the case between PT. Marindo Jaya Sejahtera and PT Hellicarg Indonesia. The research method used is a normative legal research method with descriptive analytical research characteristics, with primary, secondary and tertiary data sources, with a statutory approach (status approach) and a conceptual approach (conceptual approach). This research data analysis is qualitative analysis. The point of contact between the crime of fraud, the crime of embezzlement and acts against civil law in the legal system in Indonesia is the elements of the act itself.*

Keyword: *Fraud, Embezzlement, Forgiving Reasons, Justifying Reasons*

Abstrak: Situasi tertentu, apabila suatu perbuatan terbukti tidak merupakan tindak pidana yang artinya, perbuatan yang didakwakan dan yang telah terbukti tadi tidak ada diatur dan tidak termasuk ruang lingkup hukum pidana. Rumusan masalah dalam penelitian tesis ini adalah bagaimana titik singgung keterkaitan antara pidana penipuan dengan pidana penggelapan dan perbuatan melawan hukum perdata dalam sistem hukum di Indonesia, apa dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana menggunakan alasan pemaaf karena pengaruh daya paksa, Bagaimana penerapan alasan penghapus pidana pada putusan hakim dalam perkara antara PT. Marindo Jaya Sejahtera dan PT Hellicarg Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif analisis, dengan sumber data primer, sekunder dan tersier, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Analisis data penelitian ini adalah analisis kualitatif. Titik singgung keterkaitan antara pidana penipuan dengan pidana penggelapan dan perbuatan melawan hukum perdata dalam sistem hukum di Indonesia adalah pada unsur-unsur perbuatan itu sendiri.

Kata Kunci: Penipuan, Penggelapan, Alasan Pemaaf, Alasan Pembena

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan suatu negara kesatuan yang terdiri dari pulau-pulau dengan keanekaragaman yang berlandaskan hukum, hal ini telah diatur pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia, aturan tersebut memiliki sifat yang memaksa dan terdiri atas beberapa aturan yang harus dipatuhi, aturan tersebut meliputi bagaimana sistem masyarakat untuk bernegara, bagaimana masyarakat membedakan perilaku mana yang boleh

dan tidak boleh dilakukan, ada pula aturan yang mengatur dimana masyarakat berhubungan dengan masyarakat lainnya ataupun dengan suatu lembaga dan badan hukum. Aturan-aturan tersebut sengaja dibuat untuk menciptakan ketertiban.

Peradilan atau kekuasaan kehakiman telah dikenal sejak zaman dahulu, dan merupakan satu kebutuhan dalam hidup bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Suatu pemerintahan tidak dapat berdiri tanpa adanya peradilan, karena peradilan diperlukan untuk menyelesaikan sengketa diantara warganya. Dalam peradilan terkandung amar makruf dan nahi mungkar, menyuruh makruf dan mencegah mungkar, menyampaikan hak kepada orang yang harus menerimanya dan menghalangi orang yang zalim daripada berbuat aniaya serta mewujudkan perbaikan umum, dengan peradilan dilindungi jiwa, harta dan kehormatan.

Peradilan sebagai lambang supremasi hukum dan benteng terakhir keadilan seharusnya tidak memihak, dan memberikan perlakuan hukum yang setara merupakan dambaan semua lapisan masyarakat, karena itu hakim yang merupakan pelaksana dan ujung tombak peradilan serta yang berinteraksi dengan masyarakat dituntut untuk memiliki kualitas dan profesionalitas dalam meneliti, menimbang, dan menetapkan putusan hukum untuk suatu perkara. Hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa serta memutus suatu perkara pidana. Oleh karena itu hakim dalam menangani suatu perkara harus dapat berbuat adil. Sebagai seorang hakim, dalam memberikan putusan kemungkinan dipengaruhi oleh hal yang ada pada dirinya dan sekitarnya karena pengaruh dari faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang sehingga mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan.

Selain beberapa hal tersebut di atas, hal-hal yang mempengaruhi putusan hakim adalah unsur pembuktian.

Pembuktian merupakan unsur vital yang dijadikan bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan apakah putusan pemidanaan, putusan bebas maupun putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*). Persoalan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sudah merupakan hal yang biasa dilakukan oleh semua hakim pidana. Dalam pandangan sebagian orang awam, kegiatan mengadili sering dianggap sebagai kegiatan rutin dan mudah di lakukan oleh hakim karena sudah ada hukum acara pidana, tetapi ternyata dalam praktik, kegiatan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara bukan suatu perbuatan yang mudah dilakukan hakim, karena banyak faktor yang perlu dipertimbangkan. Faktor tersebut misalnya berkaitan dengan substansi perkara dan alat bukti yang terungkap di persidangan, dasar hukum materiel dan formil yang digunakan, isi dakwaan dan tuntutan pemidanaan, argumentasi jaksa dan advokat, kondisi korban dan masyarakat, termasuk kemungkinan adanya tekanan dari pihak tertentu, serta rasa jiwa keadilan yang abstrak.

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan berbagai macam pertimbangan. Namun sering kali putusan hakim menjadi kontroversi dan banyak ditentang oleh berbagai pihak, seperti putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*). Pasal 191 ayat (2) KUHAP menentukan, jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini biasa disebut *onslag van alle rechtsvervolging*. Apa yang didakwakan kepada terdakwa cukup terbukti secara sah, baik dinilai dari segi pembuktian menurut undang-undang maupun dari segi batas minimum pembuktian yang diatur Pasal 183. Situasi tertentu, apabila perbuatan yang terbukti

tadi tidak merupakan tindak pidana yang artinya, perbuatan yang didakwakan dan yang telah terbukti tadi tidak ada diatur dan tidak termasuk ruang lingkup hukum pidana. Atau perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman karena ada alasan pemaaf (*strafuitsluitings-gronden/feit de excuse*) dan juga ada alasan-alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgrond*).

Salah satu tindak pidana penipuan yang mana diputus bebas dalam pembedanya adalah dalam peristiwa kerjasama antara dan PT Hellicarg Indonesia. Dalam peristiwa ini, PT Hellicarg Indonesia dituding telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap PT. Marindo Jaya Sejahtera dalam hal penyewaan kapal tongkang. Akan tetapi, peristiwa ini dinilai bukan tindak pidana penipuan melainkan merupakan perbuatan wanprestasi yang mana kesepakatan keduanya adalah kontrak kerjasama. Dalam peristiwa ini juga PT Hellicarg Indonesia dinilai tidak melakukan tindak pidana penipuan karena peristiwa yang terjadi adalah adanya cuaca buruk yang mengakibatkan terjadinya terdamparnya kapal milik PT Hellicarg Indonesia dan dalam upaya penyelamatan, ternyata muatan jatuh kelaut 40% akibat cuaca buruk saat evakuasi termasuk sideboard tongkang pun jatuh kelaut bersama muatan. Dalam hal ini, cuaca buruk dapat dianggap sebagai alasan pemaaf dan bukan hal yang disengaja dalam hal tidak tercapainya hal yang diharapkan sesuai kontrak kerjasama.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif analisis, dengan sumber data primer, sekunder dan tersier, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual*

approach). Analisis data penelitian ini adalah analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Titik Singgung Keterkaitan Antara Pidana Penipuan Dengan Pidana Penggelepan dan Perbuatan Melawan Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum di Indonesia

Alasan penghapusan pidana umum dibagi menjadi dua yaitu alasan penghapusan pidana menurut undang-undang yang terdapat dalam KUHP dan alasan penghapusan pidana diluar undang-undang. Alasan Penghapusan Pidana Umum Menurut Undang-Undang meliputi tidak mampu bertanggungjawab, daya paksa, keadaan darurat, pembelaan terpaksa, pembelaan terpaksa tanpa batas, melaksanakan perintah undang-undang, perintah jabatan dan perintah jabatan tidak sah (Wahyuni, 2019).

Penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum hendaknya benar-benar mencerminkan keadilan, dimana harus didukung dengan bukti-bukti yang ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan dengan keyakinan hakim bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah bukan merupakan suatu tindak pidana atau dengan adanya keadaan-keadaan istimewa seperti adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar sehingga terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum, misalnya (Tofik & SH, 2022) kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUH Pidana), keadaan memaksa atau *overmacht* (Pasal 48 KUH Pidana), Pembelaan darurat atau *noodwer* (Pasal 49 KUH Pidana), melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUH Pidana), melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak untuk itu (Pasal 51 KUH Pidana).

Topo Santoso menggunakan istilah “alasan penghapus pidana” dan dua jenis

yakni “alasan membenar” dan “alasan pemaaf”. Peristilahan ini sama dengan istilah “dasar penghapus pidana”, “dasar membenar” dan “dasar pemaaf”. Peristilahan yang digunakan oleh Topo Santoso adalah merujuk UU No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Manullang, 2020). Pasal 378 KUHP memberikan keterangan bahwa apabila seseorang dengan tujuan atau maksud untuk memperoleh keuntungan bagi diri pribadi ataupun orang lain dengan cara melawan atau melanggar hukum, mempergunakan identitas palsu maupun menggunakan tipu muslihat untuk menggerakkan orang lain menyerahkan suatu barang atau benda dapat dihukum dengan hukuman penjara empat tahun.

Istilah penggelapan sebagaimana yang lazim dipergunakan orang untuk menyebut jenis kejahatan yang di dalam buku II Bab XXIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah suatu terjemahan dari perkataan *verduistering* dalam bahasa Belanda. Delik yang berkualifikasi atau yang bernama penggelapan ini diatur dalam Pasal 372. Banyak unsur-unsur yang menyeruapi delik pencurian, hanya saja beradanya barang yang dimaksud untuk dimiliki (*zich toeegenen*) itu di tangan pelaku penggelapan bukanlah karena seperti halnya pencurian. Pengertian pemilikan juga seperti di dalam pencurian. Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih milik (pencurian), menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain. Penggelapan diatur dalam Bab XXIV (Buku II) KUHPidana mulai dari Pasal 372 sampai dengan 377. Pengertian Yuridis penggelapan itu sendiri diatur dalam Pasal 372 KUHPidana. Tindak pidana penggelapan dikategorikan sebagai berikut: Dalam Pasal 372 KUHPidana tentang penggelapan biasa, Dalam Pasal 373 KUHPidana tentang penggelapan ringan, Dalam Pasal 374 dan pasal 375

KUHPidana tentang penggelapan dengan pemberatan, Dalam Pasal 376 KUHPidana tentang penggelapan dalam keluarga.

Sering disebutkan bahwa suatu ketentuan pidana dalam keadaan tertentu tidak dapat diterapkan, yang menunjukkan sebagai peniadaan pidana penuntutan, padahal maksud pembuat Undang-Undang ialah melarang penjatuhan pidana dalam hal itu. Hal baru jika tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, maka masih akan diadakan penuntutan yang kedua terhadap perbuatan yang sama asalkan dasar peniadaan penuntutan telah dihapuskan sedangkan jika terjadi putusan lepas dari segala tuntutan hukum maka penuntutan kedua tidak dimungkinkan (Hamzah, 2019).

Tindak pidana penggelapan atau *verduistering* dalam pokok diatur dalam pasal 372 KUHPidana, dan memiliki unsur sebagai berikut: pertama unsur subjektif yang meliputi unsur sengaja dan melawan hukum. Kedua unsur objektif meliputi barang siapa, menguasai secara hukum, suatu benda dan seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP. Bedanya ialah bahwa pada pencurian barang yang dimiliki itu masih berada di tangan pencuri dan masih harus diambilnya, sedang pada penggelapan waktu memilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan. Buku II KUHP mengatur tentang penggelapan yang terdiri dari 6 Pasal yaitu Pasal 372-377. Dengan melihat cara perbuatan yang dilakukan, maka kejahatan penggelapan terbagi atas beberapa bentuk, yaitu: Penggelapan dalam bentuk pokok, Penggelapan Ringan, Penggelapan dengan pemberatan, Penggelapan dalam kalangan keluarga.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa titik singgung keterkaitan antara pidana penipuan dengan pidana penggelapan dan perbuatan melawan hukum perdata dalam sistem

hukum di Indonesia adalah pada unsur-unsur perbuatan itu sendiri. Tindak pidana penipuan dilandaskan pada unsur adanya bujuk rayu terhadap korbannya. Sedangkan pada pidana penggelapan, unsur opzettelijk atau dengan sengaja merupakan satu-satunya unsur subjektif di dalam tindak pidana penggelapan, yakni unsur yang melekat pada pribadi pelakunya. Unsur ini juga merupakan unsur kesalahan dalam penggelapan. Sebagaimana dalam doktrin, kesalahan terdiri dari 2 bentuk, yakni kesengajaan dan kelalaian. Dengan sengaja berarti pelaku mengetahui dan sadar hingga ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Penghapusan sanksi pidana (strafuitsluitingsgronden) merupakan suatu kondisi yang mana membuat pelaku tindak pidana tidak mendapatkan sanksi pidana.³¹ Pembahasan ini akan dijabarkan secara spesifik sesuai dengan ketentuan yang berada pada Pasal 44 hingga Pasal 51 KUHP, yakni empat alasan di atas ditambah dengan dua alasan penghapus lainnya. Apabila alasan tersebut berada pada diri seorang pelaku tindak pidana, sehingga ia tidak dapat dinyatakan memiliki kesalahan, maka disebut sebagai alasan pemaaf. Jika alasan penghapus tindak pidana yang dilakukan pelaku berada pada perbuatannya secara objektif, maka disebut sebagai alasan pembenar (Rosyadi, 2022).

Wewenang Kejaksaan Dan Polri Pada Proses Tingkat Penyidikan Dan Penyelidikan Serta Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara

Sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka, terlebih dahulu dilakukan proses penyelidikan. Istilah penyelidikan dan penyidikan dipisahkan artinya oleh KUHAP, walaupun menurut bahasa Indonesia kedua kata itu berasal dari kata dasar sidik yang artinya memeriksa, meneliti. Berdasarkan Pasal 1 butir 5 KUHAP menegaskan penyelidikan adalah serangkaian tindakan/penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak

pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil. Penyidik pembantu selain diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik.

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak yang harus dilindungi pemerintah terkait perlindungan hukum terhadap diri pribadi manusia atau tersangka yang menjalani proses pemeriksaan perkara pidana, antara lain (Mujiyono, 2021): Hak Perlindungan, Hak Rasa Aman, Hak Bebas dari Penyiksaan, Hak tidak diperlakukan Sewenang-wenang, Hak tidak disiksa. KUHAP telah mengatur dengan jelas dan tegas. Hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka (Pasal 50 sampai 68 KUHAP), dan setiap pihak wajib menghormati hak-hak tersangka tersebut. Adapun hak-hak tersangka menurut KUHAP itu sendiri adalah sebagai berikut: Hak Prioritas Penyelesaian Perkara, Hak Persiapan Pembelaan, Hak Memberi Keterangan Secara Bebas, Hak Mendapatkan Juru Bahasa, Hak Mendapatkan Bantuan Hukum, Hak Menghubungi Penasihat Hukum dan Hak Diberitahukan, Menghubungi atau Menerima Kunjungan Keluarga dan Sanak Keluarganya dan Hak Berkirim Surat, Hak Menerima Kunjungan Rohaniwan, Hak Mengajukan saksi *a de charge* dan Saksi Ahli dan Hak Pemberian Ganti Kerugian dan Rehabilitasi.

Konsep perlindungan terhadap tersangka menunjukkan bahwa Hukum Acara Pidana di Indonesia menganut

sistem akusatur, dimana tersangka tidak lagi dipandang sebagai objek pemeriksaan dan kekuasaan dominan, tidak lagi berada pada legislatif melainkan kekuasaan dominan terletak pada kekuasaan yudikatif dan selalu mengacu pada konstitusi, hal ini dipertegas dengan adanya perlindungan atas hak tersangka yang diatur didalam KUHAP. Indonesia mengakui dan melindungi hak asasi manusia, termasuk hak asasi tersangka. Dalam bidang hukum acara pidana, perlindungan terhadap hak asasi manusia itu telah diberikan oleh negara, misalnya dalam bentuk hak-hak yang dimiliki oleh tersangka selama proses penyelesaian perkara pidana sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan KUHAP.

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus. Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan sosiologis.

Berdasarkan uraian di atas pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana menggunakan alasan pemaaf karena pengaruh daya paksa yaitu adanya suatu alasan-alasan yang membenarkan tindakan pelaku, maka dari itu alasan ini saling berhubungan dengan kesalahan si pelaku, maka dari itu adanya alasan penghapusan pidana hanya berlaku untuk diri sendiri atau si pelaku. adanya alasan pemaaf berarti tidak adanya pertanggungjawaban pidana, dikarenakan keadaan psikis pelaku, hubungan antara psikis seseorang dengan pertanggungjawaban pidana merupakan keadaan yang bersifat psikologis pelaku yang melakukan tindak pidana, dikarenakan keadaan psikis seseorang atau kejiwaan seseorang mengakibatkan tidak adanya pertanggungjawaban pidana, dan dengan adanya keadaan tersebut bisanya pelaku dimaafkan.

Penerapan Alasan Penghapus Pidana Pada Putusan Hakim Dalam Perkara

Antara PT. Marindo Jaya Sejahtera Dan PT. Hellicarg Indonesia

Perkara ini terjadi ketika adanya perdebatan tentang perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum yaitu PT. Marindo Jaya. PT. Marindo Jaya melakukan perjanjian Time Charter dengan PT. Hellicarg Indonesia. Perjanjian Time Charter disepakati mengenai kewajiban dan hak masing-masing pihak. Salah satu kewajiban PT. Hellicarg Indonesia adalah membayarkan sejumlah uang sebagai sewa kapal. Kedua pihak sepakat dengan pembayaran selama 3 (tiga) bulan. Akan tetapi, pada bulan yang ketiga, PT. Hellicarg Indonesia tidak melakukan pembayaran sewa kapal seperti yang telah disepakati. Karena tidak dipenuhinya pembayaran tersebut, PT. Marindo Jaya melakukan somasi sebagai peringatan kepada PT. Hellicarg.

Atas somasi tersebut, PT. Hellicarg menyatakan akan menyelesaikan pembayaran tersebut. Hingga waktu yang ditentukan, nyatanya PT. Hellicarg tidak kunjung juga menyelesaikan pembayaran. Pihak PT. Marindo Jaya merasa telah ditipu oleh PT. Hellicarg yang kemudian melakukan upaya hukum baik secara perdata dan secara pidana. Upaya hukum perdata yang dilakukan oleh PT. Marindo Jaya adalah dengan melakukan gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri Batam dengan Nomor pendaftaran perkara 153/Pdt.G/2021/PN Btm yang amarnya adalah menyatakan adanya perbuatan ingkar janji (wanprestasi) oleh Tergugat dalam hal ini pihak PT. Hellicarg.

Upaya hukum pidana ditempuh dengan adanya laporan pihak PT. Marindo Jaya dilakukan dengan melaporkan perusahaan PT. Hellicarg dengan dugaan tindak pidana penipuan. Akan tetapi, pihak PT. Hellicarg mengupayakan mediasi dan melakukan upaya perdamaian dengan ketentuan akan melakukan pelunasan pembayaran secara penuh kepada PT. Marindo Jaya. Kedua belah pihak bersepakat berdamai dan tidak melanjutkan laporan dugaan tindak pidana penipuan yang dilakukan PT. Hellicarg.

Setelah melalui proses panjang, pada akhirnya Pengadilan Negeri Batam melakukan vonis lepas dari segala tuntutan hukum karena pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. Hal ini disebabkan karena sebelumnya telah diputus sengketa antara kedua belah pihak dalam Putusan PN Batam Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Btm yang amarnya adalah menyatakan adanya perbuatan ingkar janji (wanprestasi) oleh Tergugat dalam hal ini pihak PT. Hellicarg.

Adanya putusan yang menyatakan bahwa pihak PT. Hellicarg melakukan perbuatan wanprestasi menjadi hal yang membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan sekalipun terbukti di dalam persidangan, akan tetapi bukan merupakan suatu perbuatan tindak pidana. Hal tersebut yang menjadi hal pembenar terhadap dakwaan. Majelis memutuskan bahwa perbuatan itu memang terbukti akan tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana. Alasan pemaaf adalah alasan yang meniadakan kesalahan si pembuat tindak pidana. Perbuatannya tetap bersifat melawan hukum tetapi pembuatnya tidak dapat dipidana karena padanya tidak ada kesalahan (Sunaryo et al., 2022).

Perintah penahanan terhadap tersangka/terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana harus didasarkan pada bukti (alat bukti yang sah) cukup. Persyaratannya juga harus berdasarkan ketentuan lain yang diatur dalam KUHP, seperti dasar hukum/dasar objektif dan dasar kepentingan/dasar subjektif. Seseorang tidak dapat dianggap bersalah sebelum adanya putusan hakim mempunyai kekuatan hukum yang pasti biasa dikenal dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*) (Monang Siahaan, 2019).

Menurut M. Yahya Harahap, asas praduga tidak bersalah ditinjau dari segi teknis penyidik dinamakan “prinsip Akusator”. Prinsip akusator menempatkan kedudukan tersangka/terdakwa dalam

setiap tingkat pemeriksaan (Santoso, 2020). Pasal 191 ayat (2) KUHAP menentukan, jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini biasa disebut *onstlag van alle rechtsvervolging*. Apa yang didakwakan kepada terdakwa cukup terbukti secara sah, baik dinilai dari segi pembuktian menurut undang-undang maupun dari segi batas minimum pembuktian yang diatur Pasal 183.

Pertimbangan hakim memegang peranan yang sangat penting, khususnya dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, apakah putusan yang dijatuhkan tersebut sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena bukan tidak mungkin suatu putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang telah dijatuhkan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Santoso, 2020).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan alasan penghapus pidana pada putusan hakim dalam perkara antara PT. Marindo Jaya Sejahtera dan PT Hellicarg Indonesia penghapusan pidana dalam peristiwa antara PT. Marindo Jaya Sejahtera dengan PT. Hellicarg tidak tepat jika hakim menerapkan sistem penghapusan pidana. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan Pasal 51 tidak terklasifikasikan mengenai adanya alasan untuk membenarkan pidana penipuan yang diduga dilakukan oleh PT. Hellicarg Indonesia. Apabila dasar yang dijadikan adalah bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu tindak wanprestasi, bukan merupakan suatu tindak pidana maka hal yang dijadikan alasan adalah alasan penghapus pidana. Penghapus pidana dapat dijadikan landasan karena dalam hal penghapus pidana, maka dibuktikan bahwa perbuatan yang terjadi bukanlah merupakan tindak pidana, melainkan perbuatan lainnya baik

administratif dan perbuatan perdata.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

- 1 Titik singgung keterkaitan antara pidana penipuan dengan pidana penggelapan dan perbuatan melawan hukum perdata dalam sistem hukum di Indonesia adalah pada unsur-unsur perbuatan itu sendiri. Tindak pidana penipuan dilandaskan pada unsur adanya bujuk rayu terhadap korbannya. Sedangkan pada pidana penggelapan, unsur opzettelijk atau dengan sengaja merupakan satu-satunya unsur subjektif di dalam tindak pidana penggelapan, yakni unsur yang melekat pada pribadi pelakunya. Unsur ini juga merupakan unsur kesalahan dalam penggelapan. Sebagaimana dalam doktrin, kesalahan terdiri dari 2 bentuk, yakni kesengajaan dan kelalaian. Dengan sengaja berarti pelaku mengetahui dan sadar hingga ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- 2 Pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana menggunakan alasan pemaaf karena pengaruh daya paksa yaitu adanya suatu alasan-alasan yang membenarkan tindakan pelaku, maka dari itu alasan ini saling berhubungan dengan kesalahan si pelaku, maka dari itu adanya alasan penghapusan pidana hanya berlaku untuk diri sendiri atau si pelaku. adanya alasan pemaaf berarti tidak adanya pertanggungjawaban pidana, dikrenakan keadaan psikis pelaku, hubungan antara psikis seseorang dengan pertanggungjawaban pidana merupakan keadaan yang bersifat psikologis pelaku yang melakukan tindak pidana, dikarenakan keadaan psikis seseorang atau kejiwaan seseorang mengakibatkan tidak adanya pertanggungjawaban pidana,

dan dengan adanya keadaan tersebut bisanya pelaku dimaafkan.

- 3 Penerapan alasan penghapus pidana pada putusan hakim dalam perkara antara PT. Marindo Jaya Sejahtera dan PT Hellicarg Indonesia penghapusan pidana dalam peristiwa antara PT. Marindo Jaya Sejahtera dengan PT. Hellicarg tidak tepat jika hakim menerapkan sistem penghapusan pidana. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan Pasal 51 tidak terklasifikasikan mengenai adanya alasan untuk membenarkan pidana penipuan yang diduga dilakukan oleh PT. Hellicarg Indonesia. Apabila dasar yang dijadikan adalah bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu tindak wanprestasi, bukan merupakan suatu tindak pidana maka hal yang dijadikan alasan adalah alasan penghapus pidana. Penghapus pidana dapat dijadikan landasan karena dalam hal penghapus pidana, maka dibuktikan bahwa perbuatan yang terjadi bukanlah merupakan tindak pidana, melainkan perbuatan lainnya baik administratif dan perbuatan perdata.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2019.
- Agus Sri Mujiono. *Analisis Perlindungan Hukum Hak Tersangka dan Potensi Pelanggarannya Pada Penyidikan Perkara Pidana*, <https://eprints.uns.ac.id>, diakses tanggal 22 April 2021.
- Denis Kurniawan Santoso. “Analisis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Perkara Penipuan Secara Berlanjut (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1360K/Pid/2016)”. *Jurnal Verstek* Vol. 8 No. 1, 2020.
- Fitri Wahyuni. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang

-
- Selatan: PT Nusantara Persada Utama. 2019.
- Herlina Manullang. *Reformulasi Alasan Penghapusan Pidana Korporasi Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Lemkomindo. Medan. 2023.
- Imron Rosyadi. *Hukum Pidana*, Revka Prima Media. Surabaya. 2022
- Joko Sriwidodo. *Kajian Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Kepel Press. 2019.
- Monang Siahaan. *Falsafah Dan Filosofis Hukum Acara Pidana*. Jakarta. PT Grasindo. 2019.
- Muhammad Aenur Rosyid. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Jember. IAIN Jember. 2020.
- Muhammad Taufik Makarao. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Bogor. Ghalia Indonesia. 2022.
- Sunaryo. *Tanya Jawab Seputar Hukum Acara Pidana*. Jakarta Selatan, Visimedia. 2022.
- Tofik Yanuar Chandra. *Hukum Pidana*, Jakarta. PT. Tazkia Multi Usaha. 2022.